

# RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 5162/E4/AK.04/2021 27 Desember 2021

Lampiran: satu berkas

Hal : Pemberitahuan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2021

# Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemendikbudristek

- 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
- 3. Ketua Himpunan Profesi
- 4. Pengelola Jurnal Ilmiah

Sehubungan dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2021 dan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor: 158/E/KPT/2021 tanggal 09 Desember 2021 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah periode I Tahun 2021, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir. Adapun ketentuan penerbitan sertifikat akreditasi sebagai berikut:

- 1. Usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal.
- 2. Usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal.
- 3. Usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi turun peringkat maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal.
- 4. Usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan telah memiliki sertifikat yang masih berlaku masa akreditasi, maka sertifikat baru tidak akan diterbitkan, dan sertifikat sebelumnya dapat digunakan sampai berakhir masa berlaku.
- 5. Jurnal yang sudah terakreditasi dan namanya tercantum dalam SK sebelumnya serta belum memiliki sertifikat dapat meminta sertifikat terdahulu.
- 6. Penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap setelah pengumuman ini dan dilakukan pemutakhiran data di laman : <a href="http://sinta.kemdikbud.go.id/journals">http://sinta.kemdikbud.go.id/journals</a>, sertifikat dapat diunduh langsung secara bertahap melalui akun pengusul di laman: <a href="http://arjuna.kemdikbud.go.id/">http://arjuna.kemdikbud.go.id/</a>.
- 7. Mengingat terdapat lebih dari 3.000 (tiga ribu) usulan akreditasi jurnal pada tahun 2021, bagi jurnal yang telah masuk proses penilaian namun belun tercantum pada keputusan hasil akreditasi periode I maka akan diumumkan pada periode II tahun 2021, serta bagi jurnal yang telah lolos evaluasi administrasi namun belum berkesempatan untuk dinilai, maka akan dilakukan penilaian akreditasi dan menjadi prioritas utama pada periode berikutnya di tahun 2022.
- 8. Usulan akreditasi yang diusulkan tahun 2021 namun belum dilakukan desk evaluasi maka akan dilakukan penilaian desk evaluasi pada tahun 2022.
- 9. Usulan baru dan jurnal dengan masa berlaku habis sertifikat pada tahun 2021 yang tidak lolos evaluasi administrasi, maka dapat melakukan pengajuan usulan akreditasi kembali pada periode berikutnya tahun 2022, untuk tanggal dan waktunya menunggu pengumuman resmi di laman: <a href="http://arjuna.kemdikbud.go.id/">http://arjuna.kemdikbud.go.id/</a>.

Catatan:

Balai

- 2

10. Jurnal yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 158/E/KPT/2021, tanggal 09 Desember 2021 dapat mengajukan akreditasi ulang setelah menerbitkan 4 nomor terbaru dari nomor terakhir yang diajukan pada saat akreditasi terakhir melalui laman <a href="http://arjuna.kemdikbud.go.id">http://arjuna.kemdikbud.go.id</a>.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi NIP 196404031985031008

Tembusan:

plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 158/E/KPT/2021

TENTANG

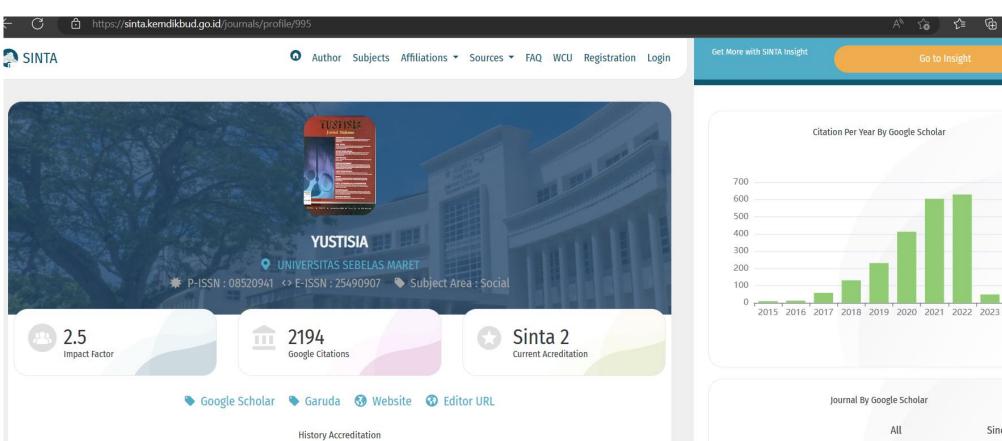
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH

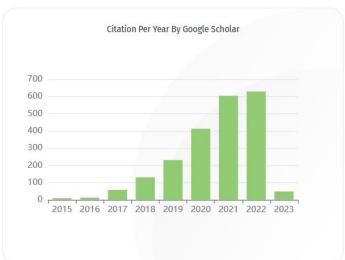
PERIODE I TAHUN 2021

# PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I TAHUN 2021

No	Nama Jurnal	eISSN	Penerbit	Keterangan
		1	Peringkat 1	
1	Al-Ihkam: Jurnal	24423084	Fakultas Syariah	Reakreditasi Naik
	Hukum dan		Institut Agama	Peringkat dari Peringkat
	Pranata Sosial		Islam Negeri	2 ke Peringkat 1 mulai
			Madura	Volume 16 Nomor 1
				Tahun 2021 sampai
				Volume 20 Nomor 2
				Tahun 2025
2	Automotive	26156636	Universitas	Reakreditasi Naik
	Experiences		Muhammadiyah	Peringkat dari Peringkat
			Magelang	2 ke Peringkat 1 mulai
				Volume 3 Nomor 1
				Tahun 2020 sampai
				Volume 7 Nomor 2
				Tahun 2024
3	REINWARDTIA	23378824	Herbarium	Reakreditasi Naik
			Bogoriense, Botany	Peringkat dari Peringkat
			Division, Research	2 ke Peringkat 1 mulai
			Center for Biology	Volume 19 Nomor 1
				Tahun 2020 sampai
				Volume 23 Nomor 2
				Tahun 2024

12	YURIDIKA	25283103	Universitas	Reakreditasi Tetap di
7			Airlangga	Peringkat 2 mulai
				Volume 36 Nomor 1
				Tahun 2021 sampai
				Volume 40 Nomor 2
				Tahun 2025
12	Yustisia	25490907	Fakultas Hukum	Reakreditasi Tetap di
8			<b>Universitas</b>	Peringkat 2 mulai
			Sebelas Maret	Volume 10 Nomor 1
				Tahun 2021 sampai
				Volume 14 Nomor 2
				Tahun 2025
		I	Peringkat 3	
1	(JMSP) Jurnal	25414429	Jurusan	Reakreditasi Tetap di
	Manajemen dan		Administrasi	Peringkat 3 mulai
	Supervisi		Pendidikan	Volume 5 Nomor 3
	Pendidikan		Fakultas Ilmu	Tahun 2021 sampai
			Pendidikan	Volume 10 Nomor 2
			Universitas Negeri	Tahun 2026
			Malang	
2	Abdihaz: Jurnal	26850354	Universitas Prof.	Akreditasi Baru
	Ilmiah		Dr. Hazairin, SH	Peringkat 3 mulai
	Pengabdian pada			Volume 1 Nomor 1
	Masyarakat			Tahun 2019 sampai
				Volume 5 Nomor 2
				Tahun 2023
3	Academic Journal	26216981	Lembaga	Reakreditasi Naik
	Perspective:		Penelitian	Peringkat dari Peringkat
	Education,		Universitas	4 ke Peringkat 3 mulai
	Language And		Swadaya Gunung	Volume 8 Nomor 1
	Literature		Jati Cirebon	Tahun 2020 sampai
				Volume 12 Nomor 2
				Tahun 2024
	l		l	1



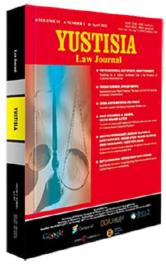


	Journal By Google Scholar	
	All	Since 2018
Citation	2194	2058
h-index	22	22
i10-index	58	54

0852-0941 (Print)

2549-0907 (Online)

### Yustisia



Yustisia Journal title

Initials Yustisia

Frequency Three times per year (April, August, and December)

DOI Prefix 10.20961

Online 2549-0907 (https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1482853462)

ISSN

chief

Print ISSN 0852-0941 (https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1180434037)

Editor-in- Dr.Hari Purwadi, S.H., M.Hum (/

https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/1395518)

Publisher Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Indonesia

Yustisia is open access, double-blind peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. The specialty of this journal is that it publishes articles in contemporary legal studies with an interdisciplinary approach, whether from an economic, political, sociocultural, technological, and other related field, both in Indonesian studies and in global perspectives. The Journal publishes articles (Research and Review Article) and Book Review.

Yustisia Jurnal Hukum is Nationally Accredited (Accreditation Rank II) (https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/995) by the Minister of Research and Technology/National Research and Innovation Agency of the Republic of Indonesia Decision No. 5162/E4/AK.04/2021 (2021-2025)

# Announcements (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/announcement)

# YUSTISIA'S NEW MANUSCRIPT TEMPLATE

11,

Please note that Yustisia Jurnal Hukum uses new manuscript template

(https://drive.google.com/drive/folders/1FVfuXCrET9WRxO\_UB6EvBt-PbJX4)Vvu?usp=sharing) from the 2022 edition.

No 3: December

Therefore, please check our new guidelines before submitting your manuscript to Yustisia Jurnal Hukum (/vustisia/index)

Posted: 2022-01-25

Articles

**Table of Contents** 

About Journal

Focus

(/yustisia/about/editorialPolicie

Publication Ethics (/yustisia/a

Author Guideline (/vustisia/at

Manuscript

(https://drive.google.com/drive/ PbJX4jVvu)



(https://doaj.org/toc/2549-0907?

source=%7B%22query%22%3A 0941%22%2C%222549-

0907%22%5D%7D%7D%5D%7D

(https://doaj.org/toc/2549-0907?

source=%7B%22query%22%3A 0941%22%2C%222549-0907%22%5D%7D%7D%5D%7D



(https://sinta.kemdikbud.go.id/j id=995)



(https://asean-

cites.org/aci\_search/journal.htm b3BlbkpvdXJuYWwmaWQ9MTA



(https://app.dimensions.ai/disco search mode=content&order=t



(https://garuda.ristekbrin.go.id/



(https://jurnal.hukumonline.con jurnal-hukum)

(https://asean-

cites.org/aci\_search/journal.htm b3BlbkpvdXJuYWwmaWQ9MT/



PDF

2022

Access to Justice: New Right or a Reaffirmation of Existing Human Rights for Persons with **Disabilities?** 

(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/issue/current)

157-166

(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402)

https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68402 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68402)

user=RirgxX4AAAAJ&hl=en)

The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is WTO's Reform а Solution?

(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070). (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070/pdf)

Intan Baretta Nur Annisa

Melaku T Zengeta

167-180

https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070

(https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070)

### **ISSN**

0852-0941 (Print)

2549-0907 (Online)

# **Editorial Team**

# **Editor in Chief**

» Hari Purwadi (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/1395518')) (Scopus ID: 57202196241) Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

# **Managing Editor**

» Sapto	Herma	<u>wan</u>
$(\underline{javascript: openRTWindow('\underline{https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/1395543'))}\_,$	(Scopus	ID:
57216344913) Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia		

» Kukuh Tejomurti

(javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/1699229')) , (Scopus ID: 57215220609) Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

# **Board of Editor**

<u>Pujiyono Pujiyono (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/1240'))</u>
, (Scopus ID: 57194243483) Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

» Muhamad	Ramdan	<u>Andri</u>	Gunawan	Wibis	ana
<u>(javascript:openRTWir</u>	ndow('https://jurnal.uns.a	ac.id/yustisia/about/edi	torialTeamBio/2470011')),	(Scopus	ID:
55523105000) Facult	<mark>y of Law University of Ir</mark>	<mark>ndonesia, Indonesia</mark>			

» Emad	<u>Mohammed</u>	Al-Ama	<u>ren</u>
(javascript:openRTWindow('https://j	urnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2660	088')), (Scopus	ID:
57216209569) Yarmouk University	<mark>, Jordan, Jordan</mark>		

» Irwansyah Irwansyah (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/3422')) (Scopus ID:

57207472072) Faculty of Law, Universitas Hasanuddin, Indonesia

» <u>Albertjan Tollenaar (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2290'))</u>
, (Scopus ID: 55626185600) Faculty of Law, University of Groningen

<u>Nonel</u> S. Solis Castillero (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2012055')), Faculty of Law, University of Panama, Panama

<u>Hikmahanto</u> <u>Juwana</u> (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2288'))</u>, (Scopus ID: 8235016600) Faculty of Law, University of Indonesia, Indonesia

<u>» Lowell Bautista (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2284'))</u>
(Scopus ID: 55962952600) School of Law, University of Wollongong, Australia

» Ahmad Almaududy Amri (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2292')), Ministry of Foreign

# **Layout Editor**

Affairs, The Republic of Indonesia, Indonesia

» Anugrah Muhtarom (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2952602'))\_, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<u>» Jelita Agape (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2952610'))</u>,
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret, Indonesia

### About Journal

Focus

(/yustisia/about/editorialPolic

Publication Ethics (/yustisia

Author Guideline (/yustisia/

Manuscript

(https://drive.google.com/driv PbJX4jVvu)

Indexed by



(https://doaj.org/toc/2549-

0907?

source=%7B%22query%22%:
0941%22%2C%2225490907%22%5D%7D%7D%5D%

(https://doaj.org/toc/2549-

0907?

source=%7B%22query%22%: 0941%22%2C%222549-

0907%22%5D%7D%7D%5D%



(https://sinta.kemdikbud.go.idid=995)



(https://asean-

cites.org/aci\_search/journal.hb3BlbkpvdXJuYWwmaWQ9M



(https://app.dimensions.ai/dissearch\_mode=content&order



(https://garuda.ristekbrin.go.i



(https://jurnal.hukumonline.c jurnal-hukum)

### (https://asean-

cites.org/aci\_search/journal.hb3BlbkpvdXJuYWwmaWQ9M



<u> Cahya</u>	Intan	<u>Ayuningsekar</u>	(nups://journals.indexcoper
javascript:openRTWindow('	https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2952669')	_, Faculty of Law	<u>id=47789)</u>

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

# **Proofreader**

» Nicole Enago (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2952545')) , ENAGO, United States



# **Editorial Staff**

(javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2952650')) Faculty of Law Universitas Sebelas Maret, Indonesia

\*\*Muhammad Syarahil Efendi (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2952619')) Faculty of Law Universitas Sebelas Maret, Indonesia

\*\*Rudi Yakup (javascript:openRTWindow('https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/about/editorialTeamBio/2582')) explore/fulldisplay?

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, Indonesia

Universite Leiden

The Netherlands

(https://catalogue.leidenuniv.explore/fulldisplay?
docid=UBL\_ALMA513504222

User

Username

Password

☐ Remember me

Login

# Information

- For Readers (https://jurnal.uns.ac.id/)
- For Authors (https://jurnal.uns.ac.id/)
- For Librarians (https://jurnal.uns.ac.id/)

### Notifications

- <u>View</u> (https://jurnal.uns.ac.id/)
- <u>Subscribe</u> (<u>https://jurnal.uns.ac.id/</u>) Supervised APJHI



(https://apjhi.org/)

Instrument Tools



About Journal Focus vitcles  Access to Justice: New Right or a Reaffirmation of Existing Human Rights for Persons with Disabilities?  Access to Justice: New Right or a Reaffirmation of Existing Human Rights for Persons with Disabilities?  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402) https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402) https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/v113.68402 https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402) https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402) https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402) https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402) https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402) https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680700 https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680700 https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680700 https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680700 https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680700 https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/580300  Cartel Indications on Determination of Loan Interest Rate in Fintech Lending https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/580300  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/680300  Linau/jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/580300  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/580300  Linau/jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/580300  Linau/jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/590807  Linau/jurnal.uns.ac.id/yustisi	https://jurnal.uns.ac.id/yus				0852-0941 (Print)
able of Contents  About Journal Focus  Pous  Vyustisia/bouteditoriap  Of Existing Human Rights for Persons with Disabilities?  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402)  Melaku T Zengela  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.68402  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402)  The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO'S Reform a Solution?  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68020)  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/58339)  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/58339)  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/583399  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/583399  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/583399  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/583399  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/583399  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/583399  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/51262)  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/512620  https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/512620  https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/512620	ol 11, No 3	3			2549-0907 (Online)
Access to Justice: New Right or a Reaffirmation of Existing Human Rights for Persons with Disabilities?  (https://j.lurnal.uns.ac.id/y.ustisia/article/view/68402) https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68402 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68402 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68402 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68402 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68402 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68070 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68070 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68070 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68070 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68070 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68339 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68339 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68339 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68339 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68339 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.68339 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.61262 https://j.urnal.uns.ac.id/y.ustisia.v113.61262 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.61262 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.61262 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.61262 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.61262 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.61262 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.61262 https://dx.doi.org/10.20981/y.ustisia.v113.61262 ht	ecember 20	22			
Access to Justice: New Right or a Reaffirmation of Existing Human Rights for Persons with Disabilities?  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402)  The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution?  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680390)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680390)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680390)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680390)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680390)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680390)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/610600)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/612620)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/6126	able of Cont	onte			About Journal
Access to Justice: New Right or a Reaffirmation of Existing Human Rights for Persons with Disabilities?  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68039)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68039)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68039)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68039)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68039)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68039)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68039)  (https://jumal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61020)  (https://dx.doi.org/10.20981/yustisia/viii3.61262)  (https://jumal.uns.	able of Colic	CIICS			
Access to Justice: New Right or a Reaffirmation of Existing Human Rights for Persons with Disabilities?  Disabilities?  Melaku T Zengets  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.68402)  The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution?  (https://jurnal.uns.ac.id/vustisia/article/view/68070)  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68402)  Intras://jurnal.uns.ac.id/vustisia/article/view/68070)  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070)  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.69070  https://dx.doi.org/10.20961/yus	rticles				
of Existing Human Rights for Persons with  Disabilities?  (https://j.urnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402)  Intros.//dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.68402  The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution?  (https://j.urnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  Intros.//j.urnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070)  Intros.//j.urnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680330)  Intros.//j.urnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680330)  Intros.//j.urnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680330)  Intros.//j.urnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/680330)  Intros.//j.urnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/650330)  Intros.//j.urna	Access to Tustic	re: New Right or a l	Reaffirmation		
Disabilities? (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402) https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.68402 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68402)  The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO'S Reform a Solution? (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070 (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070 (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) Cartel Indications on Determination of Loan Interest Rate in Fintech Lending (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/612622) https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.61262 (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/612622) https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.61262 (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y		_			
(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402) Melaku T Zengeta https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.68402 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.68402) The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution? (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.68070 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/560339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/510601)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/510601)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287)  Namik Trinasulli, Tri Lakami Indreawari, Daniel René Kandou, Mira 213-225    https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287)   https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.59287    https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.59287					PDF s://drive.google.com/driv
Melaku T Zengeta https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68402 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68402)  The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution? (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070 (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070 (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070)  Sukarmi Sukarmi, Ranitya Ganindha, Reka Dewantara https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070)  Vania Luff Safra Etianga, Selfrain Seriani https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.61262 (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.61262)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.59287)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.59287)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.59287)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.59287)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study  Nanik Theastuli Tri Laksmi Indrewary. Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Theas		ns.ac.id/yustisia/article	e/view/68402)	(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68402	<u>/pdf)</u> (4jVvu)
https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68402 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68402)  The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution? (https://ljurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/58070) (https://ljurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/58070) (https://ljurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/58070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.56339) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.56339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/51262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.681262) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.61262) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/51262)  Vania Luff Saffra Erlanga, Seffran Sefrian  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.61262 (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/51262)  Vania Luff Saffra Erlanga, Sefran Sefrian  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.61262 (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/51262)  Legal Protection of Stateless Persons Arising  From CrossBorder Marriage: Indonesia and East  Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/51262)  Nanik Trihastuli, Tri Laksmi Indrewari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuli, Tri Laksmi Indrewari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuli, Tri Laksmi Indrewari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuli, Tri Laksmi Indrewari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuli, Tri Laksmi Indrewari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuli, Tri Laksmi Indrewari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuli, Tri Laksmi Indrewari, Daniel René Kandou, Mir		,		157-166	ayod hy
The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution? (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y1113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yu	•	•			exed by
the WTO's Reform a Solution? (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/56339) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/65339) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/65339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/65339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/65339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/65339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/51262) (https://jurnal.uns.ac.id/y	( <u>https://dx.doi.org/1</u>	0.20961/yustisia.v11i3.684	<u>402)</u>		<b>DOA</b> J
the WTO's Reform a Solution? (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/56339) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/65339) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/65339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/65339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/65339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/65339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/51262) (https://jurnal.uns.ac.id/y	The Recent Cris	sis of the WTO Appel	llate Body: Is		(https://doaj.org/toc/2549-
Interest Rate in Fintech Lending (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.68070)  Cartel Indications on Determination of Loan Interest Rate in Fintech Lending (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia.y113.56339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/x113.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y113.61262 (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yust	the WTO's	Reform a	Solution?		<del></del>
Interest Rate in Fintech Lending (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.68070)  Cartel Indications on Determination of Loan Interest Rate in Fintech Lending (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia/article/view/56339) Sukarmi Sukarmi, Ranitya Ganindha, Reka Dewantara https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.56339  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262)  Interest Rate in Fintech Lending (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262/ndfili/skpvdX.jurWwmaWQ varia Lutfi Salfra Erlangga, Sefriani Sefriani 197-212  197-212  Dimensions also search/journ https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.61262  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287/ndfili/skpvdX.jurWwmaWQ (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287/ndfili/skpvdX.jurwmawQ (ht	( <u>https://jurnal.u</u>	ns.ac.id/yustisia/article	e/view/68070)	(https://iurnal.uns.ac.id/vustisia/article/view/68070	<b>BOAT</b> : c=%7B%22query%22%3 /r <b>0994</b> 1%22%2C%22549-
(https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.68070)  Cartel Indications on Determination of Loan Interest Rate in Fintech Lending (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339)  Sukarmi Sukarmi, Ranitya Ganindha, Reka Dewantara https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.56339 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.56339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.61262)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y11i3.59287)  Distribusion of the Stribasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Distribusion of the Stribasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihasuti, Trihasuti, Trihasuti, Trihasuti,					0907 %22%5D%7D%7D%5D%
Cartel Indications on Determination of Loan Interest Rate in Fintech Lending (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) Sukarmi Sukarmi, Ranitya Ganindha, Reka Dewantara https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.56339 (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.59287)  Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.59287)  Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.59287)  Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.59287  Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.59287  Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.y1113.59287		- <del>-</del>			(https://dogi.org/toc/2549-
Interest Rate in Fintech Lending (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.56339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel R	(https://dx.doi.org/1	0.20961/yustisia.v11i3.680	<u>070)</u>		
Interest Rate in Fintech Lending (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.56339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287)  Ballikpadk.yuytwmawo  Index of the stream of the Sallikpadk.yuytwmawo	Cartel Indicati	ons on Determinat	ion of Loan		ce=%7B%22query%22%3
(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339) Sukarmi Sukarmi, Ranitya Ganindha, Reka Dewantara https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.56339 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.56339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262)  Vania Lutfi Safira Erlangga, Sefriani Sefriani https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)  Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)  Salikaria Jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) Salikaria Jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287/puth Salikaria/yustisia/article/view/59287/puth Salikaria/yustisia/article/view/59287/puth Salikaria/yustisia/article/view/59287/puth Salikaria/yustisia/article/view/59287/puth Salikaria/yustisia/article/view/59287/puth Salikaria/yustisia/article/view/59287/puth Salikaria/yustisia/article/view/59287/puth Salikaria/yustisia/article/view/59287/puth Salikaria/yustisia/yustisia/article/view/59287/puth Salikaria/yustisia/article/view/59287/puth Salikaria/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustisia/yustis	Interest Ra	te in Fintech	<u>Lending</u>		%22%5D%7D%7D%5D%
Sukarmi Sukarmi, Ranitya Ganindha, Reka Dewantara  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.56339  (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.56339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Nanik Trihastuti. Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225	( <u>https://jurnal.u</u>	ns.ac.id/yustisia/article	e/view/56339)	(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/56339	/pdf)
(https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.56339)  The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287/pdf)  Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287 (https://jdx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)    Dimensions					Sinta
The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the  Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262/https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)  ballokpvdXJuYWwmaWQ  INDEX COPERN	·•				s://sinta.kemdikbud.go.id
In ELegality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262/pttts)-bxpvdXJuYWwmaWQ (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287/pdf) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287) (https://dx.doi.org/10.20961/yustis	(IIIIps://ux.uoi.org/	0.2090 <u>11 y ustisia. V 1 110.000</u>	<u> </u>		<u></u>
(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262)  Vania Lutfi Safira Erlangga, Sefriani Sefriani https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287)  Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)  Dimensions  ###################################	The Legality of	Israel's Self-Defense	Claim of the		CITATION
(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262/pdf8ii / https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262/pdf8ii / https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)    Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Diastama Anggita Ramadhan   https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Diastama Anggita Ramadhan   https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225   Marik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225	<u>Strikes</u>	on	Hamas		* *
https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262)  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study. (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287). (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287/pdf)  Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287. (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)  DIMERSIONS  (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262)  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287/pdf)  3://jurnal.hukumonlini	(https://jurnal.u	ns.ac.id/yustisia/article	<u>e/view/61262)</u>	(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/61262	<u>ruas.org/aci_searcn/journal.n</u> / <mark>pdfBl</mark> эkpvdXJuYWwmaWQ9M
https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262  (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.61262).  Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)    https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287   https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287		00 .		197-212	Dimensions
Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287). (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287/pdf) Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287. (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)    BallokpvdXJuyywmawQ INDEX COPERN I N T E R N A T I O					(https://app.dimensions.ai/dis
From CrossBorder Marriage: Indonesia and East  Timor  Case Study  (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287)  Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287  (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)    b38lbkpvdXJuyYwmaWQ  INDEX COPERN  I N T E R N A T I O	(		,		search mode=contentℴ
Timor Case Study (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287/pdf)  Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)    b38lbkpvdXJuyYwmawQ   INDEX COPERN	<u>Legal Protection</u>	on of Stateless Per	sons Arising		GARUD
(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287). (https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287/pdf).  Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225  Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)  5://asean-org/aci_search/journ.  b38lbkpvdXJuYWwmaWQ  INDEX COPERN  I N T E R N A T I O	From CrossBoro	<u>ler Marriage: Indone</u>	esia and East		s://garuda.ristekbrin.go.i
(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287) Nanik Trihastuti, Tri Laksmi Indreswari, Daniel René Kandou, Mira 213-225 Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)    Sillasean-org/aci search/journ-b3BlbkpvdXJuyYwmawQ	<u>Timor</u>	<u>Case</u>	<u>Study</u>		PDF HUKUM ONLINE
Novana Ardani, Diastama Anggita Ramadhan  https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287  (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)  b38lbkpvdXJuYYwmaWQ  INDEX COPERN	( <u>https://jurnal.u</u>	ns.ac.id/yustisia/article	e/view/59287)	(https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59287	/pdf) .Com
https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287 (https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.59287)  b38lbkpvdXJuYWwmaWQ INDEX COPERN			ené Kandou, Mira	213-225	s://jurnal.hukumonline.co
org/aci_search/journ.  b3BlbkpvdXJuYWwmaWQ  INDEX COPERN I N T E R N A T I O			1i3.59287		
B3BlbkpvdXJuYWwmaWQ  INDEX COPERN  INTERNATIO	(https://dx.doi.org/1	0.20961/yustisia.v11i3.592	<u>287)</u>		
INTERNATIO					b3BlbkpvdXJuYWwmaWQ9M
					INDEX 🗑 COPERNIC
(nttps://iournals.indexcope					INTERNATION (https://journals.indexcopern





Available online at: http://jurnal.uns.ac.id

# Yustisia Jurnal Hukum





# Legal Protection of Stateless Persons Arising From Cross-Border Marriage: Indonesia and East Timor Case Study

Nanik Trihastuti<sup>1</sup>, Tri Laksmi Indreswari<sup>2</sup>, Daniel René Kandou<sup>3</sup>, Mira Novana Ardani<sup>4</sup>, Diastama A. Ramadhan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Corresponding author's email: <a href="mailto:naniktrihastuti@gmail.com">naniktrihastuti@gmail.com</a>

# **Article Information**

Submitted: February 27, 2022
Reviewed: April 10, 2022
Revised: July 01, 2022
Accepted: August 28, 2022

### Keywords:

cross-border marriage; statelessness; nationality

DoI: 10.20961/yustisia. v11i3.59287

# Abstract

Statelessness is a continuing international legal issue, with individuals lacking the protection of fundamental rights within the jurisdiction of a State. One aspect contributing to this problem is customary cross-border marriage between people of different nationalities, particularly in local border towns, for a variety of reasons. This study examines how the phenomenon causes statelessness and undocumented people and how international human rights instruments require States to comply. This legal study compares the East Timor Constitution. According to the study, statelessness and undocumented people due to crossborder marriage by custom upset women and children since it is hard for them to get residence documents.. Cross-border marriages between East Timorese men and Indonesian women are customary and unregistered in Indonesia and East Timor. The research shows that Indonesian women/wives in East Timor cannot exercise their rights because they are not East Timorese nationals. Since women in border communities are unaware of the consequences of marrying a non-national and the requirements of naturalization in East Timor, living in the neighboring state for long periods of time causes statelessness as they lose their Indonesian nationality (if they don't renew their passport after 5 years) and aren't recognized as East Timor nationals.

# I. Introduction

Statelessness is a legal term regarding the loss of citizenship, or the absence of a recognized relationship between the individual and the State. Meanwhile a stateless person is defined as "a natural person who is not considered a national by any country" (Garner, 1999). This condition is recognized by both national law and international law, which can



Available online at: http://jurnal.uns.ac.id

# Yustisia Jurnal Hukum





# The Legality of Israel's Self-Defense Claim of the Strikes on Hamas

Vania Lutfi Safira Erlangga<sup>1</sup>; Sefriani<sup>2</sup>

<sup>12</sup>the Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia

Corresponding author's email: sefriani@uii.ac.id

# **Article Information**

Submitted: May 15, 2022
Reviewed: July 01, 2022
Revised: August 20, 2022
Accepted: September 01, 2022

# Keywords:

claims; international law; self-defense

DoI: 10.20961/yustisia. v11i3.61262

# **Abstract**

Israeli strikes against Palestine on May 10-12, 2021, in the Gaza Strip caused massive losses of civilians. Israel claims that the strikes are forms of self-defense in response to previous attacks by Hamas. This study has two objectives: (1) to analyze the arrangements of self-defense in international law and (2) to find out the legality of Israel's self-defense claim of the strikes on Hamas on May 10-12, 2021. The study is the legal research with a conceptual, historical, and statutory approaches. The results of the study reveal that (1) self-defense is customary international law contains in Article 51 of the United Nations Charter; (2) Israel's self-defense claim is invalid since it does not comply with Article 51 of the United Nations Charter and elements contained in International Customary Law, such as neccesity, proportionality, immediacy, and imminence.

### I. Introduction

International law strictly prohibits the use of force against other countries in accordance Article 2 (4) of the United Nations Charter. The article states that all member-states must refrain the use of violence against the territorial integrity or political freedom of other states, or in other ways that are inconsistent with the purposes of the United Nations' establishment (Sefriani, 2016a). The prohibition on the use of force has been declared *jus cogens* as a legal norm that is recognized by the international community; and the implementation cannot be reduced or changed (Alder, 2013).

The provisions prohibiting the use of force in Article 2 (4) raises several questions among legal experts. One of them is that how is the nature of the act in the form of a threat of force, and how can a threat of force trigger the right to self-defense inherent in every legal subject (Alder, 2013). This debate has prompted new legal rights as exceptions to

# Legal Protection of Stateless Persons Arising From CrossBorder Marriage: Indonesia and East Timor Case Study

by Nanik Trihastuti

**Submission date:** 13-Mar-2023 12:20PM (UTC+0700)

**Submission ID: 2035906490** 

**File name:** 59287-195585-1-PB.pdf (391.08K)

Word count: 5809 Character count: 31796



Available online at: http://jurnal.uns.ac.id

# Yustisia Jurnal Hukum

ISSN (Print) 0852-0941 | ISSN (Online) 2549-0907 |



# Legal Protection of Stateless Persons Arising From Cross-Border Marriage: Indonesia and East Timor Case Study

Nanik Trihastuti<sup>1</sup>, Tri Laksmi Indreswari<sup>2</sup>, Daniel René Kandou<sup>3</sup>, Mira Novana Ardani<sup>4</sup>, Diastama A. Ramadhan<sup>5</sup>

1,2,3,4,5 Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Corresponding author's email: naniktrihastuti@gmail.com

### Article Information

Submitted: February 27, 2022 Reviewed: April 10, 2022 Revised: July 01, 2022 Accepted: August 28, 2022

### Keywords:

cross-border marriage; statelessness; nationality

DoI: 10.20961/yustisia. v11i3.59287

### Abstract

Statelessness is a continuing international legal issue, with individuals lacking the protection of fundamental rights within the jurisdiction of a State. One aspect contributing to this problem is customary cross-border marriage between people of different nationalities, particularly in local border towns, for a variety of reasons. This study examines how the phenomenon causes statelessness and undocumented people and how international human rights instruments require States to comply. This legal study compares the East Timor Constitution. According to the study, statelessness and undocumented people due to crossborder marriage by custom upset women and children since it is hard for them to get residence documents. Cross-border marriages between East Timorese men and Indonesian women are customary and unregistered in Indonesia and East Timor. The research shows that Indonesian women/wives in East Timor cannot exercise their rights because they are not 71st Timorese nationals. Since women in border communities are unaware of the consequences of marrying a non-national and the requirements of naturalization in East Timor, living in the neighboring state for long periods of time causes statelessness as they lose their Indonesian nationality (if they don't renew their passport after 5 years) and aren't recognized as East Timor nationals.

### I. Introduction

Statelessness is a legal term regarding the loss of citizenship, or the absence of a recognized relationship between the individual and the State. Meanwhile a stateless person is defined as "a natural person who is not considered a national by any country" (Garner, 1999). This condition is recognized by both national law and international law, which can

Yustisia Volume 11 Number 3 (December 2022)

Legal Protection of Stateless...

213

©Authors 2022: This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited

arise as a result of disputes over national citizenship laws, due to changes in sovereignty over territories and due to denationalization by the country where the person concerned is a citizen (Starke, 2008).

Under Article 15 paragraph (1) of the Universal Declaration of Human Rights 1948, it is stated that: "Everyone has the right to a nationality", and paragraph (2) states that "No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality". Based on this provision, from the perspective of human rights, it is the right for everyone to have citizenship or nationality, and therefore it is an obligation for the state to respect certain citizenships of a person.

In order to carry out this obligation, Article 1 of 1930 Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws stipulates that "It is for each State to determine under its own law who are its nationals. This law shall be recognized by other States in so far as it is consistent with international conventions, international custom, and the principles of law generally recognized with regard to nationality". In this regard, international law basically provides the conditions for granting citizenship to the domestic jurisdiction of the country concerned. However, there is a limitation that this national provision does not conflict with international principles or provisions related to nationality issues.

Nationality has an important role because it determines the benefits that citizens are entitled to and the obligations they must perform. However, in some cases, by leaving the definition and provisions regarding nationality to each State, it will cause a conflict between the national provisions of one State and another (Edwards, 2019). This will ultimately have implications for the rights of citizens to obtain the protection of their country and the various benefits that arise as stipulated by international law.

An example is the conflict of legal provisions in the field of nationality between Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia (Law No. 12 of 2006) and East Timor's Lest Decree-Law No. 1 of 2004 of Regulation on the Law on Citizenship, as well as provisions regarding nationality contained in the Constitution of the Democratic Republic of East Timor. This has resulted in the unprotected rights of Indonesian women who marry traditionally with men from East Timor and then reside in East Timor due to the loss of their citizenship due to various reasons. In addition, it also raises problems related to the citizenship of children born from cross-border marriages through local custom.

In general, an individual can lose his nationality through several events, namely: a) renunciation, for example through a declaration of renunciation of the citizenship of the person concerned if he or she is of age; b) revocation, for example due to a special denationalization law issued by the country of origin of the citizenship of the person concerned; and c) a long stay abroad (Edwards, 2019).

In the perspective of human rights, people with stateless status are included in the category of vulnerable persons, namely people what re vulnerable to abuse of power from a stronger party, thus requiring protection from international human rights law. This is

based on the argument that as long as an individual is a human being, then he/she has and needs human rights.

In this study, the focus stateless persons is not due to their refugee or asylum seeker status, but rather the loss of citizenship is due to cross-border marriages traditionally carried out by people on the border between States. For example, cross-border marriages that occur on the border between Indonesia and Timor Leste, cross-border marriages on the borders of Malaysia (Hashim, 2019), Vietnam-China (UNFPA, 2018), Thailand-Laos (Phukongchai, 2022), and between Malo-Burkina Faso-Ivory Coast in East Africa (Bloom, 2021).

Cross-border marriage is marriage between individuals with different national or residency statuses (Williams, 2021). It is where social reproduction is no longer confined within the nation-state but takes place transnationally (Leng, 2021). The occurrence of cross-border marriage comes with various causes and reasons from different regions of the world, including, but not limited to, the consequence of armed conflict, migration, State succession, nomad practices, customary practices of ethnic and border communities, and other social and economic purposes.

In the case of the loss of one's citizenship due to the customary marriage process, which is generally not registered, it will cause a conflict of interest between the individual interest and the public interest. To solve this problem, individual rights are often limited by the concept of the public interest, although in its implementation this concept is often misused.

Human Rights as the original reason was intended to be a 'trump card' for the sufferer (Orend, 2002). Rights as a 'trump card' are often a problem, when there is a conflict between one right and another. For this reason, based on the "specificationism" argument which states that each right consists of a group of qualifications that state when or not the qualifications of the right are valid, it is necessary to consider the context in which the conflict occurred. Thus there will be the possibility of different views whenever there is a conflict.

Based on the opinion that the law is required to solve all problems that arise as a result of various social transactions, the management of conflicts between interests becomes the domain of the main function of law.

For this reason, in this study, the issue of stateless persons caused by cross-border customary marriages will be studied from a human rights perspective, focusing on the State's responsibility to provide legal protection through the effectiveness of the rights possessed by stateless persons. The study was also conducted by examining the effectiveness of legal protection in several States that have the same or almost the same cases.

This study uses a legal research approach. Research that is based on a normative legal approach involves the finding of legal rules, legal principles, and doctrines of the law to address the particular issue of law (Marzuki, 2008). The results of the study of

law in the form of an argument, theory, or new concept serve as the basis to address the legal issue (Christiani, 2016). Secondary data is the main data in this study. This study is intended to examine the legal protection of stateless persons under international law as a consequence of cross-border marriage by custom.

# II. The Potency and Impact of Loss of Citizenship Due to Cross-Border Marriage by Custom

Cross-border marriages that result in the emergence of stateless person status can occur through several events, among others, through marriages carried out by people of different nationalities without going through the proper procedures, as is done by undocumented migrant workers with someone who has stateless status due to illegal entry into the State. In addition, it can also occur as a result of traditional marriages being carried out in border areas, which due to the high dowry causes these marriages to not be carried out in the Church or to be registered.

Similar to this in the Thai-Lao border community, over half of rural Laotians do not have the official documents required for marriage registration. This because importance is placed on local values, customs & norms, and how to maintain kinship with crossborder families, rather than on legal status (Phukongchai, 2022). As a consequence, family members in such communities may hold Thai, Lao, or even dual citizenship. Thus the lengthy stays across the border leads to family members at risk to losing their nationality and without marriage registration, their children are also at risk to become stateless.

For the case of Sino-Vietnamese cross-border marriages, most of the Vietnamese women residing and married in China are illegal immigrants. In addition to the lack of education of laws and regulations on nationality and marriage, Vietnamese women are unablesto obtain supporting documents required or obtain a passport and visa. Therefore, couples cannot go through legal marriage registration procedures in China. As their marriage are invalid, Vietnamese women then is not recognized and protected by Chinese law; not to mention the possibility lose their nationality and become stateless persons (UNFPA, 2018).

In Malaysia, tendencies of statelessness towards children are caused by the failure of cross-border couples to register their marriage but are only bound by wedlock. This is due to the lack of recognition or rather a restrictive threshold for cross-border marriage to be upheld as it considered to be syubhah (means a sexual intercourse performed with a presumption that it is a valid marriage but in actual fact the marriage is not valid) under Malaysia's Islamic Family law (Hashim, 2019).

Based on the Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954, 'statelessness' is divided into two categories, namely de jure statelessness and de facto statelessness. 'De jure statelessness' is a condition where a person does not have any citizenship identity and therefore does not get his rights as a citizen based on the national law of the State concerned (Tucker, 2014). Meanwhile, 'de facto statelessness' is a condition where a person cannot prove the effectiveness of his national identity, therefore he also does not get access to effective protection.

The condition of statelessness generally affects women or children who are born, although there are exceptions in some countries, such as customary marriages on the border of the Republic of Indonesia and the Democratic Republic of East Timor (East Timor). When a customary marriage occurs between a woman who is an Indonesian citizen and a man of East Timor, in general the woman will be brought to East Timor and stay there. For women who do not have residence documents due to lack of knowledge or do not consider it important, they will have to face the issue of citizenship in East Timor. For women who are documented, they can renew their citizenship status at the Indonesian Embassy in East Timor, or apply for East Timor citizenship even though it is very difficult. This is different when the undocumented woman/wife lives in East Timor for a period of time until she meets the provisions regarding the time limit for the loss of citizenship according to the Indonesian Citizenship Law.

The opposite condition occurs towards children born in cross-border customary marriages. If he/she is born to parents from East Timor, the potential for this state of statelessness is unlikely to occur, as long as he can prove that his father or mother or both parents are from East Timor. This refers to the provisions of Article 3 of the East Timor Constitution, which states that:

- There shall be original citizenship and acquired citizenship in the Democratic Republic of East Timor.
- 2. The following citizens shall be considered original citizens of East Timor, as long as they are born in the national territory:
  - a) Children of father or mother born in East Timor;
  - b) Children of incognito parents, stateless parents or parents of unknown nationality;
  - c) Children of a foreign father or mother who, being over seventeen years old, declare their will to become East Timorese nationals.
- 3. Irrespective of being born in a foreign country, children of a Timorese father or mother shall be considered original citizens of East Timor.
  - a) Children of an East Timorese father or mother living overseas;
  - b) Children of an East Timorese father or mother serving the State outside the country;
- 4. Acquisition, loss and reacquisition of citizenship, as well as its registration and proof, shall be regulated by law.

By referring to the provisions of Article 3 of the East Timor Constitution, the status of children from marriage also raises the issue of citizenship, not because children from cross/customary marriages will be stateless, but instead have the potential to have dual

citizenship, whether the child was born in Indonesia or in East Timor. This is further clarified by the Provisions on Procedures for obtaining citizenship as provided for in Section 1 Decree-Law No. 1 of 2004 regarding Regulation on the Law on Citizenship which regulates the citizenship status of a child whose one of the parents is a citizen of East Timor, that "a person born in the territory of East Timor or born in another country but whose birth certificate states that one of the parents is the color of the country East Timor, has the right to Timorese citizenship".

Thus, the status of a stateless mother in East Timor will not affect the citizenship status of the child as an indigenous citizen of East Timor as stated in Section 3 Article 2 (b) of the East Timor Constitution which states that "the following citizens shall be considered original citizens of East Timor, as long as they are born in the national territory (children of incognito parents, stateless parents or parents of unknown nationality". This is reaffirmed through the provisions in Article 1 (b) Section 8 Law No. 9 of 2002 (Law on Citizenship) regarding Original citizenship which states that: "a child of incognito parents, stateless parents or parents of unknown citizenship".

In Malaysia for example, cross border marriage that occurs between individuals where one is of Malaysian nationality, their children have the potential of being undocumented, specifically towards Muslim children. Malaysian law requires that that parents must ensure that their marriage be valid under hukum syara' and law under the Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (hereinafter known as IFLFTA 1984), for a marriage to have legal status. Under Section 113 of IFLFTA provides that children that are born out of syubah intercourse (involving cross border marriage) the marital status will be declared as invalid (Hashim, 2019).

The case of Thai-Lao is similar to Indonesia's case; cross-border marriages are still not acknowledged by the authorities because their registration was not made under the Thai and Lao laws. In addition to the unrecognition of cross-border marriage, Thai and Lao laws are seen to be one of a complicated, costly, and time-consuming process (Phukongchai, 2022).

For women or wives, even though their existence is accepted by the community, because of their stateless status, they do not get their rights as citizens of East Timor, especially the right to express their political aspirations in election activities. For children who ultimately have to be stateless, it will make it difficult for these children to gain access to education.

This is also certain for children in Malaysia born out of cross border marriage. It is estimated that there are 50,000 undocumented children in Malaysia (Yeo, 2012). Children born without parents registering their marriage will have the effect of their right to education as the Ministry of Education requires the parents to provide the student's birth certificate and/or identity card and parents' identity card and marriage certificate [Hashim, 2019]. Additionally, they are denied access to healthcare and other public services, putting them at risk of exploitation and poverty (Hashim, 2019).

# III. Legal Protection for Stateless Persons in the Perspective of International Human Rights Law

In accordance with the development of legal disciplines regarding the protection of human rights internationally, international human rights law has also developed as a branch of public international law. This has the consequence that because international human rights law is part of public international law that regulates State conduct, international human rights law also regulates State behaviour, especially human rights. The State in this case is not only intended to refer to the government, but also the legislative and judicial bodies, including all State apparatus/law enforcement officials.

According to Thomas Buergenthal "International Human Rights is the law that deals with the protection of individuals and groups against violations by government of their internationally guaranteed rights and with the premotion of these rights" (Buergenthal, 1995). Through this definition, the State has an obligation to protect, guarantee and fulfil human rights. This is because the State has the power, so that in the context of human rights, the State is required not to abuse its power (abuse of power).

Abuse of power and State omission on these obligations will result in human rights violations. Thus, human rights violations can occur as a result of the State doing something (violation by commission) or as a result of the State not doing something (violation by omission).

As Rhona K. Smith views, "All Peoples demand, and deserve, to be treated as the equal(s) of other inhabitants of the State in which they live. Such equality, as has been noted, dependent on the abolition of all forms of discrimination. Racial discrimination is deemed particularly acute as individuals are discriminated against solely an account of the colour of their skin or their ethnic origin, factor over which they clearly have no control..." (Smith, 2007).

The principle of equality, the prohibition of discrimination and positive obligations imposed on each country are intended to be the basis for state actions to protect certain rights. Equality requires equal treatment, in which the same situation must be treated equally, and with debate, which in different situations is treated differently (Smith, 2007).

The prohibition of discrimination is an important part of the principle of equality, where if everyone is equal, then of course there is no discriminatory treatment. Meanwhile, the principle of positive State obligations arises as a logical consequence of the provisions under international human rights law that the individual is the right bearer, while the State is the duty bearer of human rights.

By law, the State is the party that is obliged to protect, guarantee and fulfil human rights. While concretely, the State's obligations regarding human rights are realized by protecting the human rights of each individual from abuse of State power, guaranteeing the existence of human rights of each individual in legal provisions and in their implementation and fulfilling the human rights of each individual.

Likewise with someone who is stateless. The condition of statelessness in general will result in him having the potential to be denied his citizenship status by the State.

Therefore, according to international law, a person should not be in a state without citizenship status to the point that he does not get guaranteed legal protection.

Based on the Universalist Theory in which human rights are universal - hence human rights are owned by individuals regardless of the values or culture possessed by a society or in a country – combined in the context of a stateless person, it is appropriate that human rights overcome geographical boundaries as well as differences in race, gender, religion, language, culture inherent in a person. As a consequence of this understanding, even people with stateless status are entitled to legal protection from the State.

The issue of human rights violations is always associated with the obligations of the atte or parties who are legally obliged to protect (safeguard) and respect international human rights norms.

Referring to the opinion of Victor Conda, "Violation of human rights is a failure of a conduct of another party legally obligated to comply with international human rights norms. Failure to fullfill an obligation is a violation of that obligation. A violation gives rise to domestic or international remedies for such state conduct" (Conda, 1999), this means that human rights violations will always be attributed to the State which in this case is operationalized by all its apparatus (State agents).

Based on the preamble of the UDHR which states that "human rights should be protected by the rule of law", this means that the State must protect human rights through legal means. Thus, human rights must be regulated through legal mechanisms, which are packaged in the form of legal products that substantially must refer to international human rights legal instruments. However, the State can also elaborate on particular local elements into legal instruments in the context of regulating human rights, as long as this does not conflict with universal human rights values as stated in various international human rights law instruments.

In general, State responsibility will arise if the State commits things such as breaching/violating an international agreement, violating the territorial sovereignty of another country, damaging the territory or property rights of another country, using armed violence against another country, harming the diplomatic representatives of other countries, or misconduct in treating foreign nationals (Harris, 1998).

Based on the concept of State responsibility, a State is responsible if it violates its obligations under international law. The International Law Commission/ILC states that violations of State obligations which are classified as "international wrongful acts" include gross violations of human rights, which are categorized as international crimes.

Human rights provide moral and legal guarantees for individuals to exercise control and encourage regulation in the practices of State power over individuals, it ensures the existence of individual freedom in dealing with the State and requires the State to meet the basic needs of individuals within its jurisdiction.

# A. Legal Protection against Statelessness under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination

Nationality is an important right for the fulfilment of other human rights; it determines the rights and benefits that nationals are entitled to (McDougal, 1974). In this regard, Article 9 of the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination (CEDAW) endows to women equal rights with men. Furthermore, the second part of the article states that "they shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband." This governs that a woman's nationality should not automatically be changed by marriage or a change in her husband's nationality. The right to nationality for women under Article 9 of CEDAW also extends to cases of cross-border marriage, where women spouses marry husbands of different nationality and reside in the bordering State (Edwards, 2019).

In this case, cross-border marriages that occurs in local/rural border communities risks causing statelessness for women/wives that migrates to the husband's State (UNHCR-EC, 2009). Looking specifically at the Indonesian-East Timor border, cross-border marriages between East Timorese men and Indonesian women are carried out by custom and are not registered under the laws of Indonesia or East Timor. As field research shows, Indonesian women/wives that reside in East Timor lack the fulfilment of their rights as they are not legally considered nationals of East Timor, for example, they are unable to participate in elections. As women in border communities are unaware of the impact of marriage to a non-national, and considering the requirements of naturalization in East Timor, residing in the neighboring State for long periods of time causes statelessness as they lose their Indonesian nationality (occurs if an individual does not renew his/her passport after 5 consecutive years), and is also not recognized as an East Timor national.

Noting the conflict of nationality laws between States, especially bordering States, the failure of both States to accommodate women that married are non-nationals breaches Article 9 of CEDAW and constitutes as discrimination against women defined under Article 1 of CEDAW.

# B. Legal Protection against Statelessness under the Convention on the Rights on the

Depending on the nationality law of States, not only does cross-border marriage lead to the cause of stateless persons, but children born out of it are at risk of statelessness. Hence having an effect on fundamental rights such as the rights to education, health care, and social services (Edwards, 2019).

The rights of children under international human rights law are specifically address in the 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC). Article 7 of CRC

provides the State's obligation for every child to acquire a nationality (Edwards and Waas, 2014). It states that "the child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents." Here, the CRC Committee affirmed that States must ensure that 'all necessary measures are taken to prevent the child from having no nationality' (Doek, 2006).

The effects of cross-border marriages towards children differs in many States as States adopt different principles of nationality. States that adopt the jus sanguinis principle (nationality determined by the nationality of one or both parents), Meanwhile States that adopt the jus soli principle (nationality determined by birth on the territory). With this understanding, a child born on the territory of a State where nationality at birth is established by jus sanguinis and whose parents are citizens of jus soli States, is considered to be stateless. Because the child was not born in its territory, the State of the parents refuses to grant nationality, and the State of the child was born likewise declines as the parents are foreign nationals (Samore, 1951).

Instances of children and parents having different nationalities would frequently occur if jus soli alone determined nationality at birth. Meanwhile, children of stateless parents would similarly be stateless if jus sanguinis were the exclusive standard (Samore, 1951).

Due to the nature of cross-border marriages conducted by rural communities, children born through mere wedlock (without registration) coupled with wives residing abroad for long period stay, children of such are potent to statelessness since birth registration would be difficult, leading to the inability to access healthcare, education and social services (Ziemele, 2007).

With children and women at heightened risk of statelessness as a cause of rural cross-border marriages, States have positive obligations under international human rights law, specifically CEDAW and CRC, to enforce and take necessary measures to ensure that none are left without nationality.

# IV. Conclusion

In conclusion, cross-border marriage by the custom in the border areas leads to a chain of legal consequences due to several factors including the absence of marriage certificates required for nationality applications, constant illegal border-crossing visits between the nationals, and the lack of awareness of border residence to obtain identity and residence documents. Moreover, other than statelessness, the conflict of nationality principles recognized by the laws of States may also lead to undocumented persons, statelessness and also dual nationality. Looking specifically at the Indonesian-East Timor border, cross-border marriages between East Timorese men and Indonesian women are carried out by custom and are not registered under the laws of Indonesia or East Timor. As field research shows, Indonesian women/wives that reside in East Timor lack the

fulfilment of their rights as they are not legally considered nationals of East Timor, for ample, they are unable to participate in elections. As women in border communities are unaware of the impact of marriage to a non-national, and considering the requirements of naturalization in East Timor, residing in the neighboring State for long periods of time causes statelessness as they lose their Indonesian nationality (occurs if an individual does not renew his/her passport after 5 consecutive years), and is also not recognized as an East Timor national. Noting the conflict of nationality laws between States, especially bordering States, the failure of both States to accommodate we pen that married are non-nationals breaches Article 9 of CEDAW and constitutes as discrimination against women defined under Article 1 of CEDAW

### Acknowledgments

Highest appreciation and utmost thanks to the United Nations High Commissioner for Refugees in Indonesia for the opportunity, funding and support to conduct field research in East Nusa Tenggara, Indonesia. Highest appreciation is also given to Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., as Dean of the Faculty of Law of Universitas Diponegoro who has provided support in the form of facilities to conduct research; and to our interviewees in North Central Timor, Belu, and Kupang for the time, availability and honesty to be interviewed; and to all parties who have helped the authors in completing the study and rewriting the results of this study.

# Bibliography

- Alice Edwards. (2019). Displacement, Statelessness, and Questions of Gender Equality and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Background paper prepared for a joint UNHCR and the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women seminar.
- Bloom, Tendayi and Lindsey N. Kingston. (2021). Statelessness, Governance, and the Problem of Citizenship. Manchester: Manchester University Press.
- Buergenthal, Thomas. (1995). *International Human Rights In a Nutshell*. Minnesota: West Publishing Company.
- Christiani, Theresia Anita (2016). Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *Procedia Social and Behavioral Sciencesio*, 219. doi: <a href="https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006">https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006</a>.
- Conda, H. Victor. (1999). A Handbook of International Human Rights Terminology. Lincoln NE: Nebraska Press.

Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste 2002

Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Law 1930

Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954

- Doek, Jaap E. (2006). The CRC and The Right to Acquire and To Preserve a Nationality. Refugee Survey Quarterly. 25(3), 26-32. doi: https://doi.org/10.1093/rsq/hdi0143.
- Edwards, Alice and Laura van Waas (ed). (2014). Nationality and Statelessness under International Law. Cambridge: Cambridge University Press.
- Garner, Bryan A. (ed). (1999). Black's Law Dictionary, 7th Edition. Minnesota: West Publishing Company.
- Harris, D.J.. (1998). Cases and Materials on International Law. London: Sweet and Maxwell.
- Hashim, Noraini Md. (2019). Children of Cross-Border Marriage: Rights and Future. International Journal of Academic Research Business and Social Sciences, 9(5), 470-480. doi: 10.6007/IJARBSS/v9-i5/5888.
- Law Number 12 of 2006 on the Citizenship of the Republic of Indonesia
- Law Number 9 of 2002 on the Citizenship
- Leng, Chee Heng and Brenda S.A. Yeoh (2021). Family Social Reproduction: Conflict and Compromise in Cross-Border Marriages between Chinese and Malaysian Men and Vietnamese Women. Institutions and Economies. 13(4), 93-120. Doi: https://doi. org/10.22452/IJIE.vol13no4.4.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum, 2nd Edition. Jakarta: Kencana.
- McDougal, Myres S., Harold D. Lasswell and Lung-chu Chen (1974). Nationality and Human Rights: The Protection of the Individual in External Arenas. Yale Law Journal, 83(5), 900-998. doi: https://doi.org/10.2307/795378.
- Orend, Brian. (2002). Human Rights: Concept and Context. Ontario: Broadview Press.
- Phukongchai, Phonwichain (2022). Complex Citizenship from Below among Cross-Border Families in a Thai-Lao Border Community. Journal of Mekong Societies, 18(1), 198-223. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/ view/260477.
- Samore, William (1951). Statelessness as a Consequence of the Conflict of Nationality Laws. American Journal of International Law. 45(3), 476-494. doi: https://doi. org/10.2307/2194545.
- Smith, Rhona K. M.. (2007). Textbook on International Human Rights, 3rd Edition. New York: Oxford University Press.
- Starke, J.G. (2008) Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teresa Yeo, Research: 50,000 undocumented and stateless children in Malaysia, Citizens Journal, 2012, https://cj.my/81519/research-50000-undocumented-and-statelesschildren-in-malaysia/, (accessed 6 September 2022).
- Tucker, Jason (2014). Questioning de facto Statelessness: By looking at de facto Citizenship. Tilburg Law Review, 19, 276-284. doi: 10.1163/22112596-01902026.

- UNFPA (2018). Sino-Vietnamese Cross-Border Marriage in the Context of Sex Imbalance: View from China. Beijing: UNFPA Country Office in China.
- UNHCR Executive Committee. (2009). Conclusions Adopted by The Executive Committee on the International Protection of Refugees: 1975 2009(Conclusion No. 1 109)
- Universal Declaration of Human Rights 1948
- Williams, Lucy. (2021). Global Marriage: Cross-Border Marriage Migration in Global Context. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Ziemele, Ineta. (2007). A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 7 on the Right to Birth Registration, Name and Nationality, and the Right to Know and Be Cared for by Parents. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

# Legal Protection of Stateless Persons Arising From Cross-Border Marriage: Indonesia and East Timor Case Study

ORIGINA	ALITY REPORT				
6 SIMILA	<b>%</b> ARITY INDEX	6% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPER	S
PRIMAR	RY SOURCES				
1	Submitt Student Pape	ed to University	of Exeter		1 %
2	WWW.Ne				1 %
3	Submitt Student Pape	ed to University	of Queenslan	d	1 %
4	Sandesł	, Daniel, Shah, S n. "International tional Human Rig	Human Rights	s Law",	1 %
5	china.ur	nfpa.org			1%
6	eudl.eu Internet Sour	ce			1 %
7	policyle Internet Sour	banon.org			1 %

Exclude quotes On Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

# Legal Protection of Stateless Persons Arising From Cross-Border Marriage: Indonesia and East Timor Case Study

GRADEMARK REPORT	
FINAL GRADE	GENERAL COMMENTS
/76	Instructor
, , ,	
PAGE 1	
PAGE 2	
PAGE 3	
PAGE 4	
PAGE 5	
PAGE 6	
PAGE 7	
PAGE 8	
PAGE 9	
PAGE 10	
PAGE 11	
PAGE 12	
PAGE 13	